

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

LAPORAN TPID KABUPATEN KOTABARU TRIWULAN IV TAHUN 2022

Adapun perkembangan inflasi di Kabupaten Kotabaru pada Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BULAN OKTOBER 2022

Pada bulan Oktober 2022 Kabupaten Kotabaru telah mengalami inflasi sebesar 0,04 persen yang ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 118,68. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya harga beberapa komoditas, yaitu : Daging Ayam Ras, Beras, Sewa Rumah, Labu Parang, dan Bensin. Beberapa Indeks Kelompok Pengeluaran yang memiliki andil inflasi tertinggi, yaitu : Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,07 persen, Kelompok transportasi sebesar 0,27 persen, Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,42 persen. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari 2022-Oktober 2022) sebesar 7,61 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Oktober 2022 terhadap Oktober 2021) sebesar 8,64 persen.

BULAN NOPEMBER 2022

Untuk bulan Nopember 2022 kembali Kabupaten Kotabaru mengalami inflasi sebesar 0,39 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 119,14. Komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi, antara lain : Ikan Kembung, Bawang Merah, Nasi dengan lauk, dan Beras. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa Indeks Kelompok Pengeluaran, yaitu : Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,21 persen, Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,04 persen. Adapun tingkat inflasi tahun kalender (Januari 2022-Nopember 2022) sebesar 8,02 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Nopember 2022 terhadap Nopember 2021) sebesar 8,69 persen.

BULAN DESEMBER 2022

Kabupaten Kotabaru pada bulan Desember 2022 kembali mengalami inflasi sebesar 0,58 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 119,83. Komoditas yang mengalami kenaikan harga, yaitu : Beras, Emas Perhiasan, Tomat, Nasi dengan lauk, dan Bawang Merah. Sedangkan beberapa Indeks Kelompok Pengeluaran dengan andil inflasi tertinggi diantaranya yaitu : Kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,25 persen, Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,31 persen, Kelompok kesehatan sebesar 0,07 persen, Kelompok rekreasi dan budaya sebesar 0,32 persen. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari 2022-Desember 2022) sebesar 8,65 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2022 terhadap desember 2021) adalah sebesar 8,65 persen.

Adanya perkembangan yang cukup signifikan terhadap kenaikan harga beberapa komoditas pangan seperti Bawang Merah, Beras Lokal, dan Tomat karena masih disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang baik sehingga banyak terjadi gagal panen ditambah adanya kenaikan harga BBM sedikit menghambat kelancaran distribusi pasokan pangan karena adanya dampak dari naiknya tarif/ongkos angkutan.

Berbagai upaya dan langkah-langkah kebijakan strategis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Tim TPID dan Tim Satgas Pangan Kab Kotabaru dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi serta risiko ke depan dalam pengendalian inflasi.

Salah satu kendala yang cukup menjadi perhatian khusus dan pekerjaan rumah bersama adalah naiknya harga BBM yang sangat berdampak luas pada naiknya harga seluruh komoditas pangan dan tarif/ongkos angkutan di semua lini yang notabene nya Kabupaten Kotabaru sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah terutama ferry penyeberangan ASDP Batulicin-Tanjung Serdang karena belum ada nya jembatan penghubung antar Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut.

Sedangkan disisi lain kendala yang dihadapi adalah sangat berkurangnya lahan pertanian/perkebunan di Kabupaten Kotabaru untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang cukup tinggi apalagi menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan, hal ini disebabkan selain sebagian besar luas wilayah merupakan Kawasan Hutan Lindung juga adanya perubahan lahan menjadi perkebunan sawit dan pertambangan, demikian juga dengan petani peladang yang biasa memanfaatkan hutan untuk bercocok tanam sudah sangat terbatas karena ada aturan pelarangan pembakaran hutan/lahan, belum lagi permasalahan lainnya berupa lahan yang ada dinilai kurang efektif untuk lahan pertanian/perkebunan karena tidak subur. Sehingga dengan segala tantangan yang dihadapi ini perlunya peningkatan kerjasama dengan daerah penghasil dengan memanfaatkan pelabuhan laut untuk kelancaran distribusi.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Adapun identifikasi permasalahan dalam pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Kotabaru Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Kenaikkan harga BBM masih menjadi andil penyumbang inflasi tertinggi yang sangat berdampak pada naiknya harga dan tarif/ongkos angkutan;
- Naiknya harga Avtur bahan bakar pesawat terbang dan belum adanya keseragaman harga berdampak pada naiknya harga tiket angkutan udara yang sangat tinggi;
- Berkurangnya pasokan komoditas pangan seperti Bawang Merah, Beras, dan Tomat karena faktor cuaca, gagal panen berdampak pada naiknya harga di pasaran;
- Tingginya harga daging sapi segar dan daging ayam ras karena masih adanya praktek monopoli karena kurangnya penyedia;
- Angkutan Laut Tradisional yang melayani rute angkutan orang dan barang dari Kotabaru ke Kecamatan-Kecamatan sampai saat ini belum tersentuh BBM Bersubsidi dari Pertamina sehingga berdampak pada cukup tingginya ongkos angkutan;
- Angkutan darat/angkutan pedesaan yang melayani rute angkutan orang dan barang dari Kotabaru antar Kecamatan di Pulau Laut atau sebaliknya belum bisa diberi bantuan subsidi ongkos angkutan karena belum berbadan hukum sebagai salah satu syarat;
- Naiknya tarif ferry penyeberangan ASDP Batulicin-Tanjung Serdang yang cukup signifikan berdampak pada naiknya harga dan tarif/ongkos angkutan orang dan barang sehingga dianggap kebijakan yang kurang tepat namun menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
- Masih kurang efektifnya program/kegiatan pelaksanaan operasi pasar/pasar murah dalam upaya menahan laju inflasi di Kabupaten Kotabaru karena masih belum tepat sasaran;
- Belum adanya jembatan penghubung antar Pulau Kalimantan dan Pulau Laut berdampak

pada tingginya harga dan ongkos angkutan di Kabupaten Kotabaru dan ini semoga menjadi perhatian bersama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Klasifikasi Permasalahan :

Ketersediaan Pasokan :

- Dampak kenaikan harga BBM dan faktor cuaca sehingga mempengaruhi jumlah panen dari daerah penghasil pasokan pangan seperti Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Tanah Laut sehingga untuk memenuhi ketersediaan pasokan agar stabil dengan memasok kebutuhan pangan dari Pulau Sulawesi dan Jawa;
- Di pasaran ketersediaan pasokan pangan aman terkendali hanya ada sebagian kecil ketersediaan pasokan mengalami penurunan seperti Bawang Merah, dan Beras.

Keterjangkauan Harga :

- Untuk Kabupaten Kotabaru dengan keadaan geografis yang cukup unik dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi namun tidak berdampak luas pada daya beli masyarakat sehingga harga pangan dan barang pokok penting lainnya masih bisa terjangkau;
- Khusus harga daging sapi segar yang merupakan harga tertinggi se Indonesia sekitar Rp. 160.000,- karena masih kurangnya penyedia namun harga tersebut cenderung stabil dari awal hingga akhir tahun kalender sehingga tidak berpengaruh pada daya beli masyarakat;
- Naiknya tarif ferry penyeberangan ASDP Batulicin-Tanjung Serdang yang cukup tinggi sehingga masyarakat menggunakan alternatif ferry penyeberangan pihak swasta lainnya yang beroperasi yaitu ferry penyeberangan Tarjun-Stagen;
- Untuk tarif angkutan udara yang sangat tinggi sehingga kurang terjangkau daya beli masyarakat yang lebih memilih mode angkutan darat/travel.

Kelancaran Distribusi :

- Guna mendukung kelancaran distribusi dengan peningkatan jalan penghubung dengan daerah penghasil dan kerjasama pemanfaatan pelabuhan jalur laut distribusi;
- Pada Triwulan IV ini hampir tidak ada gangguan dalam hal distribusi baik bahan pangan maupun barang karena didukung penuh oleh Polres Kotabaru dan Dinas Perhubungan Kab Kotabaru yang bersinergi termasuk memantau distribusi BBM dari pangkalan agar tidak ada penyalahgunaan yang mengakibatkan kelangkaan BBM sehingga kelancaran distribusi terganggu.

Komunikasi Efektif :

- Rapat koordinasi pemantapan kerjasama MoU untuk pemanfaatan pelabuhan jalur distribusi laut dengan Pemerintah Provinsi Sulselbar dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Rapat koordinasi bersama Tim TPID Kab Kotabaru dengan pihak Maskapai Penerbangan (Lion Grup), pihak pengelola Bandara Gt. Syamsir Alam, pihak ASDP Ferry Penyeberangan, pihak pengelola pelabuhan Stagen-Pelindo guna membahas kenaikan harga atau tarif angkutan;
- Melakukan monitoring intensif dan cek lapangan bersama Tim Satgas Pangan Kab Kotabaru terhadap ketersediaan pasokan di gudang-gudang distributor besar yang ada;
- Sosialisasi dan memberi pemahaman kepada para pelaku usaha dan pedagang, para

distributor baik di pasar tradisional maupun retail/pasar modern akan pentingnya menjaga kebersamaan dalam menahan laju inflasi;

- Rapat koordinasi dan aksi bersama Tim TPID Provinsi Kalimantan Selatan dalam sinergi pengendalian inflasi melalui program/kegiatan yang tepat sasaran dan efektif menahan laju inflasi di daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Program Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Kotabaru pada Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a). Rapat Evaluasi Inflasi Kabupaten Kotabaru

Hari/Tanggal : Selasa, 04 Oktober 2022

Tempat : Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kotabaru

Pimpinan rapat : Drs. H. Murdianto, M.Si (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda)

b). Rapat Pembahasan Penggunaan Dana DTU 2% dalam pengendalian inflasi di daerah

Hari/Tanggal : Senin, 19 Desember 2022

Tempat : Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kotabaru

Pimpinan rapat : Drs. H. Murdianto, M.Si (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda)

c). Pelaksanaan operasi pasar/pasar murah di Kecamatan-Kecamatan yang dipimpin oleh Bupati Kotabaru, Sekretaris Daerah Kab Kotabaru beserta seluruh jajaran terkait lainnya;

d). Pengecekan pasokan barang di distributor bersama Tim Satgas Pangan dan Tim TPID Kab Kotabaru, dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab Kotabaru, Kepala Reskrim/Intelkam Polres Kotabaru dan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Kotabaru;

e). Surat Edaran Bupati Kotabaru Nomor 065/2173/SETDA tentang Menjaga Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Menjelang Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023;

f). Acara penanda tanganan MoU Kesepakatan Bersama Pemnafaatan Transportasi Laut Antar Pelabuhan dan Pembangunan Antar Daerah, dipimpin oleh H. Sayed Jafar Alaydrus, SH (Bupati Kotabaru);

g). Penyerahan bansos dan bantuan peralatan kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM menggunakan dana BTT dalam rangka pengendalian inflasi di daerah;

h). Menggalakkan Gerakan Menanam dalam rangka upaya pengendalian inflasi di daerah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kotabaru pada Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Perlunya peningkatan program/kegiatan khususnya pada Dinas/Instansi pelaksana maupun Dinas/Instansi pendukung lainnya dalam rangka pengendalian inflasi di daerah yang menggunakan dana BTT;
- b. Peningkatan pelaksanaan kegiatan operasi pasar/pasar murah khususnya di wilayah Kecamatan Pulau Laut Utara dan Pasar Limbur Raya/Pasar Kemakmuran;
- c. Perlunya diberikan anggaran untuk honorarium Tim TPID dan Tim Satgas Pangan Kab Kotabaru guna menunjang kelancaran tugas karena selama ini belum ada honor kegiatannya;
- d. Peningkatan kerjasama antar daerah melalui MoU Sentra Pangan agar pasokan dan distribusi lancar dan terkendali;
- e. Peningkatan pemberian bantuan berupa subsidi dan bansos atau peralatan usaha kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM;
- f. Peningkatan kapasitas Tim TPID Kab Kotabaru dan BUMD dengan kegiatan Uji Tiru ke daerah/BUMD yang dianggap berhasil dalam pengendalian inflasi di daerah;
- g. Peningkatan jalan penghubung dan pemanfaatan pelabuhan laut antar daerah untuk kelancaran distribusi;
- h. Peran aktif pimpinan daerah dan jajarannya yang didukung oleh wakil rakyat/DPRD dan semua unsur terkait lainnya dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kotabaru pada Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan harga dan ketersediaan pasokan komoditas pangan serta kelancaran distribusi yang terpadu antara Tim TPID dan Tim Satgas Pangan Kab Kotabaru agar secara dini dapat mendeteksi potensi-potensi rawan pangan dan risiko ke depan baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang dalam pengendalian inflasi di daerah;
2. Untuk jangka panjang agar dibangun Gudang Penyimpanan Pangan yang memiliki kapasitas yang representatif guna menjaga kelancaran dan penyediaan kebutuhan pasokan pangan masyarakat;
3. Peningkatan pemberian bantuan berupa subsidi dan bansos kepada masyarakat melalui program/kegiatan yang menggunakan dana BTT;
4. menyiapkan program/kegiatan baru yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam menahan laju faktor pendorong inflasi dengan terus koordinasi dan sinergitas dengan program/kegiatan Tim TPID Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Melakukan koordinasi lanjutan dan kerjasama dengan pihak Maskapai Penerbangan (Lion Grup) terkait harga tiket angkutan udara dan fasilitasi penggunaan CSR perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kab Kotabaru dalam peningkatan

jumlah penumpang dari karyawan;

6. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait kebijakan menaikkan tarif ferry penyeberangan milik ASDP rute Batulicin, Tanah Bumbu-Tanjung Serdang, Kotabaru;
7. Meningkatkan hasil produksi dalam daerah melalui peningkatan program/kegiatan pada Dinas Pertanian/Ketahanan Pangan Kab Kotabaru, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab Kotabaru melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).